

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS  
KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TENTANG  
PERSETUJUAN PEMERIKSAAN DALAM PROSES  
PERADILAN SESUAI PASAL 66 UUJN**

**TESIS**

**DANIEL PASCALIS MANAEK  
0806426572**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
JUNI 2010**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS  
KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TENTANG  
PERSETUJUAN PEMERIKSAAN DALAM PROSES  
PERADILAN SESUAI PASAL 66 UUJN**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**DANIEL PASCALIS MANAEK  
0806426572**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
JUNI 2010**

i

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Daniel Pascalis manaek**

**NPM : 0806426572**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 16 Juni 2010**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Daniel Pascalis Manaek, S.H.  
NPM : 0806426572  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Notaris atas Keputusan  
Majelis Pengawas Daerah tentang Persetujuan  
Pemeriksaan dalam Proses Peradilan sesuai Pasal  
66 UUJN

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chaerunnisa Said Salenggang, S.H., M.Kn. ( )

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ( )

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. ( )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Juni 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan tesis ini. Penulisan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam Penulisan Tesis ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari Mama Saida dan Papa Parlin selaku orangtua yang tak henti-hentinya memberi semangat juaan dalam menghadapi kehidupan, serta doa restunya. Serta berbagai pihak lainnya yang turut serta membantu dalam Penulisan ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- (1) Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Hukum Kenotariatan Universitas Indonesia;
- (2) Chairunissa Said Selenggang, SH. MKN, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (3) Keluarga Besar saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- (4) Seluruh keluarga besar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia baik staff pengajar, staff administratif maupun Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (IMMK FHUI) tahun 2009-2010.
- (5) Tim Futsal MKN 2008 yang telah memberi warna selama dua tahun ini kepada penulis. Dengan futsal kita satu dan saling memiliki. Maju terus futsal MKN. Love u all guys.
- (6) Geng Rose (Bang Ro, Delyk dan Patar) yang telah memberikan semangat dikala penulis merasa jatuh, kalian sebagai tempat pelarian penulis di saat jenuh dan sepi;
- (7) Zenericho, ga ada lo sepi bro, Ocu, Irwan, Sammy, Dion, Zacky, Heny, Icha, Novi, Kris, Darwin, Om Yudo, yang telah memberikan canda dan tawa serta ilmunya kepada penulis. Penulis bersyukur mempunyai kalian semua.
- (8) Jennifer Tobing, terima kasih atas dukungan untuk penulis. Kamu membantu sekaligus juga menghambat pembuatan tesis ini (hahaha).
- (9) Sahabat-sahabat tercinta yang lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu serta Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2008

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yesus Kristus berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 07 Juni 2010

Penulis



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademis Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daniel Pascalis Manaek

NPM : 0806426572

Program Studi: Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perlindungan Hukum terhadap Notaris atas Keputusan Majelis Pengawas Daerah tentang Persetujuan Pemeriksaan dalam Proses Peradilan sesuai Pasal 66 UUJN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 16 Juni 2010

Yang menyatakan

(Daniel Pascalis Manaek)

## ABSTRAK

Nama : Daniel Pascalis Manaek  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Notaris atas Keputusan Majelis Pengawas Daerah tentang Persetujuan Pemeriksaan dalam Proses Peradilan sesuai Pasal 66 UUJN.

Dalam dunia notaris, seringkali notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang hukum perdata maupun pidana, menyangkut akta otentiknya yang dibuatnya. Penilaian terhadap hal tersebut, didasarkan kepada kode etik profesi notaris dan juga peraturan jabatan dengan melihat adanya unsur-unsur kesalahan, dimana dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur pada pasal 66 UUJN. MPD merupakan benteng terakhir yang memberikan atau menolak ijin pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim atas diri seorang notaris. Perlindungan hukum bagi notaris diperlukan dalam hal tersebut di atas untuk menjaga keluhuran dan martabat notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas negara dalam bidang hukum perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan khusus MPD dalam pasal 66 UUJN dan perlindungan jaminan hukum bagi notaris yang diloloskan diperiksa dalam peradilan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa undang-undang tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum jika notaris diloloskan untuk diperiksa dalam proses peradilan, akan tetapi notaris dapat menggunakan hak ingkarnya dan juga bila merasa dirugikan haknya dapat melakukan upaya hukum gugatan ke peradilan tata usaha negara (TUN). Hasil penelitian menyarankan bahwa haruslah ada persamaan pandangan dan pemahaman antara MPD sebagai pengawas dan penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai pemeriksa dalam memaknai tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat umum serta Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap keputusan yang meloloskan untuk diperiksa adalah melalui gugatan ke peradilan TUN.

Kata Kunci:

Majelis Pengawas Daerah (MPD), perlindungan hukum, upaya hukum



## ABSTRACT

Name : Daniel Pascalis  
Program study : Magister of Notary  
Title : Legal protection towards Notary over the Decision of District Supervisory Magistrate (MPD) regarding the approval on the investigation in the court process in compliance to Article 66 Notary Law (UUJN)

This thesis describes that is not uncommon for a Notary to be one of the parties in the legal suit, in relation to his/her authentic deed. According Article 66 UUJN, in valuating the above-mentioned matter, the District Supervisory Magistrate (MPD) must consider the Professional Code of Ethic (KEP) and the regulation to determine whether the elements of wrongdoings. MPD is deemed to be the last effort to give an approval or permit the Notary to be called for investigation and by investigator, public prosecutor and the judge. Legal protection towards Notary is needed if the above-mentioned is able to uphold the honor and integrity of the Notary in the performing his/her duty as public official, who is performing the public task in the field of private/civil law. The purpose of this research is to understand how the legal protection towards a Notary is guaranteed by not involving Notary in the investigation in court. This thesis uses the Normative Research Method. This thesis concludes that the provisions in the relevant law do not specifically regulate the legal protection in the situation where the Notary is not involved in the court's investigation, however, Notary can use his./her special rights to deny presence in the court (hak ingkar), if the Notary reckons that his/her rights is being violated then, legal effort (appeal) can be made through the Court of Public Affairs (TUN). This research recommends that there should be a uniform understanding among MPD, investigator, public prosecutor and the judge in investigating the Notary in his/her authority as a public official, and filing legal effort(appeal) towards the MPD's Decision in allowing the process of investigation towards the Notary

Keywords :

Legal protection, District Supervisory Magistrate (MPD)

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i         |
| HALAMAN PERNYATAAN PENGESAHAN ORISINALITAS.....  | ii        |
| LEMBAR PENGESAHAN .....  | iii       |
| KATA PENGANTAR .....   | iv        |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....   | vi        |
| ABSTRAK .....  | vii       |
| ABSTRACT.....  | viii      |
| DAFTAR ISI.....  | ix        |
| <b>1. PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang Permasalahan .....  | 1         |
| 1.2 Pokok Permasalahan .....   | 9         |
| 1.3 Metode Penelitian.....   | 9         |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....  | 11        |
| <b>2. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS<br/>KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TENTANG<br/>PERSETUJUAN PEMERIKSAAN DALAM PROSES PERADILAN<br/>SESUAI PASAL 66 UUJN .....</b> | <b>13</b> |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris .....  | <b>13</b> |
| 2.1.1 Sejarah Lembaga Notariat Di Indonesia .....  | 14        |
| 2.1.2 Pengertian Notaris .....   | 17        |
| 2.1.3 Tugas dan Wewenang Notaris .....   | <b>20</b> |
| 2.1.4 Kewajiban dan Larangan Notaris.....  | 23        |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik .....   | 27        |
| 2.2.1 Pengertian Akta Otentik.....   | 27        |
| 2.2.2 Pembuktian Akta Otentik.....   | 29        |
| 2.2.3. Akta Notaris sebagai Akta Otentik dan Bukti Tertulis .....  | <b>31</b> |
| 2.2.4. Bentuk dan jenis Akta Notaris .....   | 32        |
| 2.2.5 Syarat sahnya Akta Notaris .....   | 36        |
| 2.2.6 Akta Notaris yang Dapat Dibatalkan dan Batal demi Hukum .....  | <b>37</b> |
| 2.3. Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis.....   | 44        |

|   |    |
|---|----|
| 2.3.1 Kewenangan Majelis Pengawas Daerah .....  | 47 |
| 2.3.2 Kewenangan Khusus Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 66 UUJN.....  | 52 |
| 2.4 Analisa Hukum .....   | 55 |
| 2.4.1 Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Pasal 66<br>UUJN beserta peraturan pelaksanaannya.....                | 55 |
| 2.4.2 Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang dipanggil dalam Proses<br>Peradilan terkait Pasal 66 UUJN.....                           | 58 |
| 2.4.2.1 Notaris dalam Peradilan Perdata .....   | 58 |
| 2.4.2.2 Notaris dalam Peradilan Pidana .....  | 63 |
| 2.4.3 Upaya Hukum yang dapat dilakukan Notaris atas Keputusan Pengawas<br>Daerah yang meloloskan notaris dalam Proses<br>Peradilan..... | 68 |
| <b>3. PENUTUP</b> .....   | 77 |
| <b>3.1 simpulan</b> .....   | 77 |
| <b>3.2 Saran</b> .....  | 78 |
| <b>DAFTAR REFERENSI</b> .....   | 79 |
| <b>LAMPIRAN</b>   |    |